

Tourism Dependency Patterns in Komodo National Park

Pola Ketergantungan Pariwisata di Taman Nasional Komodo

Dhika Kurniawan Agung

Magister Antropologi, Universitas Gajah Mada
dhika14045@mail.ugm.ac.id

(*) Corresponding Author
dhika14045@mail.ugm.ac.id

How to Cite: Dhika Kurniawan Agung. (2024). Pola Ketergantungan Pariwisata di Taman Nasional Komodo doi: 10.36526/js.v3i2.3668

Received : 21-02-2023 Revised : 26-03-2024 Accepted : 03-04-2024	Abstract The designation of Komodo National Park as a super priority destination, the zoning policy and the discourse of closing the area have limited the access of people living in the National Park area. The community's main livelihood as fishermen is limited to certain zones. This qualitative research uses qualitative data collection techniques, namely (1) Participant observation (2) In-depth interviews; (3) Document study. This research uses the snowball sampling method in determining informants. The results show that changes in environmental management are not only limited to changing the environment, but also forming new subjects in the community. The main livelihood of the community as fishermen is limited to certain zones, slowly fishermen's livelihoods are uncertain results, making people switch livelihoods to the tourism sector. The high standard of tourism sometimes makes some local tourism actors unable to keep up, resulting in dependence on capital and human resources from developed country investors. The low bargaining position of the community occurs due to the monopoly of the tourism business from investors.
--	---

Keywords:

Ketergantungan,
pariwisata,
Pembangunan,
Taman Nasional Komodo,

PENDAHULUAN

Peran penting sektor pariwisata yakni memberikan kontribusi pendapatan bagi negara karena mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Menurut Yakub (2019) pariwisata di beberapa negara mampu pemeratakan pembangunan, bahkan di wilayah yang dianggap terpencil. Senada dengan Yakub, Ismiyati (2010) mengatakan bahwa kesadaran tentang potensi wisata lokal berdampak pada peningkatan ekonomi, sehingga kemandirian dan pembangunan daerah dapat tercipta. Potensi pariwisata didukung melalui berbagai regulasi salah satunya UU No 10 Tahun 2009. Dalam regulasi tersebut pariwisata terdiri dari berbagai aspek seperti satwa, alam darat, alam laut, peninggalan benda bersejarah dan tradisi. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan setiap individu, masyarakat atau kelompok dengan melibatkan pemerintah setempat. Berjalannya pariwisata di suatu daerah dapat terjadi jika beberapa aspek pendukung seperti hotel, home stay atau penginapan lokal, transportasi yang terintegrasi, dan ketersediaan pelayanan makanan atau konsumsi bagi wisatawan (Lee, 2015).

Taman Nasional Komodo (TNK) adalah objek wisata tingkat nasional maupun internasional, didalamnya terdapat satwa endemik yaitu Komodo (*Varanus komodoensis*). Selain itu, pesona alam baharinya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Pencapaian besar TNK ketika pada tahun 2012 yakni dianugerahi penghargaan New Seven Wonders of Nature atau keajaiban dunia versi alam. tentu saja pencapaian ini membanggakan bagi pariwisata Indonesia kedepan. Wacana untuk membranding TNK secara lebih luas mulai digagas sejak kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melalui festival "Sail Komodo 2013". Sedangkan pada tahun 2018 Presiden Jokowi menetapkan Labuan Bajo sebagai penopang TNK sebagai satu dari 10 Bali baru serta ditetapkan sebagai kawasan pariwisata super prioritas yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi baru di masa yang akan datang. Menindaklanjuti wacana tersebut, kemudian presiden menerbitkan PP No 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Labuan Bajo Flores (BPOLBF). Kehadiran BPOLBF diharapkan dapat menyusun strategi optimalisasi, pengembangan pariwisata, serta pembangunan kawasan di TNK, Labuan Bajo dan Flores.

Menurut Rajapakse (2016) Penanaman modal asing dalam pembangunan pariwisata negara berkembang sangat penting, karena pada umumnya negara berkembang tidak memiliki pendanaan yang memadai. Begitupula Streimikiene, et al (2021) yang menyatakan bahwa tingginya biaya pembangunan pariwisata dapat dipenuhi seluruhnya negara, maka investasi asing menjadi solusi yang dapat diambil negara. Tingginya biaya pembangunan pariwisata, sangat disadari pemerintah Indonesia, maka dari itu diterbitkan Permen LHK Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019. Regulasi tersebut memungkinkan investor mendapatkan izin pengelolaan dikawasan TNK.

Regulasi baru dari pemerintah menumbuhkan minat dari investor, menurut Budiman (1995) munculnya hotel-hotel berbintang sebagai bukti perkembangan dan masuknya penanam modal nasional, multinasional dan transnasional yang merupakan bagian dari mata rantai hotel-hotel internasional yang memiliki 'nama besar' dan sudah menunjukkan kelasnya didunia kepariwisataan atau perhotelan. Pasca terbitnya Permen LHK tahun 2019 beberapa perusahaan seperti PT Segara Komodo Lestari (SKL), PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE), PT Synergindo Niagatama (SL) telah mengantongi izin pengelolaan diwilayah TNK. Tak hanya itu, beberapa perusahaan lainnya juga dalam proses pengajuan izin pengelolaan wilayah. Kondisi demikian menuai kritik dari berbagai pihak seperti Walhi ataupun SunSpirit For the Justice karena negara dianggap mengesampingkan prinsip-prinsip konservasi alam di TNK.

Pariwisata TNK saat ini sudah seperti pasar bebas, kepemilikan saham ataupun investasi yang masuk bukan berasal dari lokal. Segmen pariwisata internasional yang terbentuk sebagian besar dikuasai oleh jaringan investor asing, terkadang hal ini menyebabkan masyarakat lokal menjadi terbatas dalam upaya mengembangkan bisnis pariwisata dan hanya mendapatkan peluang kecil gemerlapnya pariwisata. Penetapan TNK sebagai destinasi super prioritas, kebijakan zonasi dan wacana penutupan wilayah membuat akses masyarakat yang tinggal dikawasan Taman Nasional menjadi terbatas. Pekerjaan utama masyarakat sebagai nelayan menjadi terbatas di zona-zona tertentu saja, perlahan pekerjaan nelayan yang tidak menentu hasilnya menjadikan masyarakat beralih pekerjaan ke sektor pariwisata. Mata pencaharian baru seperti naturalist guide, freelance guide, master diving, penjual souvenir, pemahat patung dan penjual makanan. Penghasilan yang didapatkan dari sektor pariwisata dianggap masyarakat lebih stabil dibandingkan menjadi nelayan. Se jauh pengamatan dan studi literatur yang dilakukan penulis, nampaknya belum ada penelitian yang menguraikan pola ketergantungan yang terjadi pariwisata di TNK dari berbagai tingkatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk melihat pola ketergantungan yang terjadi pada pariwisata TNK, melalui penafsiran atas perkataan, perilaku, tindakan dan gerakan fisik orang-orang untuk menemukan makna dan jejaring makna dilakukan dengan merujuk pada kategori-kategori kultural di dalam konteks sosialnya (Spradley: 1980). Teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu (1) Observasi partisipan (2) Wawancara mendalam; (3) Studi dokumen. Penelitian ini menggunakan metode snowball sampling dalam menentukan informan. Snowball sampling yaitu metode sampling dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lain nya (Moleong, 2010:4).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi Literatur

Penelitian dari Abdul Karim berjudul "Pariwisata dan Kekuasaan: Sebuah Telaah Foucauldian" membahas tentang kekuasaan dalam pariwisata yang terbagi menjadi tiga aspek yaitu wisatawan, masyarakat dan makelar (agen tur wisata dan negara). Dalam kerangka ini, kategori baru dari makelar digunakan untuk menunjukkan orang-orang yang mendapatkan pencaharian untuk keterlibatan dengan produksi pariwisata. Pemilik hotel dan karyawan, vendor, dan pemandu wisata yang menyediakan wisatawan

dengan barang dan jasa. Makelar juga dapat diartikan sebagai pengontrol 'kuasa' yang membentuk atau mengidentitaskan pengetahuan tentang konsep pariwisata. Makelar terbagi menjadi dua bagian yaitu negara dan agen tur, kedua nya dapat melegitimasi wisatawan dan masyarakat. Wisatawan sebagai target agen tur dikontrol melalui buku panduan, petunjuk jalan, ataupun melalui guide, dalam hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan. Masyarakat 'lokal' sebagai kelompok bawah dikontrol melalui program pelatihan dan sertifikasi, sehingga ruang ekspresi dalam memilih pekerjaan sangat dibatasi. Pelatihan dan sertifikasi secara tidak langsung memaksa masyarakat untuk bekerja pada agen-agen tur yang ada. Artikel dari Karim, A. (2017) dapat menjadi literatur yang relevan dalam melihat proses pembentukan identitas pariwisata, pendekatan politik yang digunakan setidaknya mampu menguraikan aktor-aktor yang berkuasa maupun yang dikuasai.

Artikel dari Gunawan, M. P dengan judul "Pengembangan Pariwisata Internasional di Indonesia Dalam Konteks Teori Ketergantungan" mencoba menguraikan teori ketergantungan dalam melihat perkembangan sektor pariwisata Indonesia. Negara-negara maju dengan tingkat produktivitasnya yang tinggi, dalam batas-batas tertentu memegang kendali terhadap pertumbuhan pariwisata dunia. Wisata asing dari negara maju mengharapkan atau bahkan menuntut agar mereka mendapatkan fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan yang didapatkan di negaranya, hal ini menjadi awal terjadinya pariwisata internasional masuk ke negara berkembang contohnya standarisasi hotel berbintang. Proses internasionalisasi tersebut setidaknya menjadi acuan bagi investor untuk menentukan jenis produk wisata yang akan diciptakan, sesuai dengan peluang bisnis yang dilihat investor tersebut. Tingginya standar acuan, terkadang membuat beberapa negara berkembang tidak mampu, sehingga terjadi ketergantungan terhadap modal dari negara maju. Ketergantungan berikutnya bahwa mereka berada dalam posisi tawar menawar yang kalah, karena kedatangan wisata ke negara tujuan juga bagian dari kendali pengusaha dari negara maju yang mengatur perjalanan wisata. Rute pesawat (transit), sumberdaya manusia, dan promosi dari negara maju merupakan ketergantungan lainnya yang pada akhirnya sulit bagi negara berkembang untuk meningkatkan perekonomiannya. Ketergantungan yang terjadi tidak hanya dilihat secara makro, namun disini masyarakat yang terikat kerja dengan perusahaan pariwisata juga akan mengalami ketergantungan. Melihat bahwa teori ketergantungan atau dependensi menjadi analisis tulisan ini maka artikel dari Gunawan (1994) yang fokus kajiannya pada pengembangan pariwisata Internasional di Indonesia (dengan analisis teori ketergantungan) mampu memberi gambaran yang lebih komprehensif.

Artikel dari Walpole dengan judul "Local Economic Impacts Of Dragon Tourism In Indonesia". Walpole mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai nelayan dan belum memiliki ketertarikan terhadap jasa pariwisata, sehingga sampai di era awal tahun 2000an terjadi ketidakesetaraan distribusi keuntungan antara operator penyedia jasa tur wisata dengan masyarakat di Kawasan Taman Nasional Komodo. Sama halnya dengan ekonomi lokal tetap bergantung pada jaringan nasional maupun internasional, sehingga hubungan inti-pinggiran juga ada dalam konteks lokal. Pengembangan wisata di kawasan Taman Nasional Komodo belum mengorientasikan tujuan ekowisata. Setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi perhatian Walpole (2000) pertama, pembangunan sekitar Labuan Bajo sebagai tempat transit membutuhkan modal yang tinggi, sehingga modal asing diperlukan dalam proses pembangunan. Daerah ini khususnya dipandang potensial bagi industri pariwisata di Indonesia bagian timur, yang secara bertahap meluas ke timur Bali. Hal ini dilihat Walpole dapat membahayakan kemampuan masyarakat lokal untuk mengontrol dan memanfaatkan pengembangan sehingga mudah terjadi komodifikasi lingkungan mereka. Kedua, minimnya kepemilikan keterampilan yang relevan atau kesempatan untuk melakukan pelatihan. Akibatnya, kesempatan kerja didasarkan pada keterampilan seadanya seperti menjadi pegawai pembersih hotel. Terlebih bagi bahwa TNK merupakan segmen pariwisata internasional, bahasa asing menjadi hal yang mutlak dimiliki pelaku wisata. Masyarakat lokal mengalami keterbatasan sehingga enggan menjadi pelaku wisata. Ketiga, membatasi keuntungan lokal dengan mengarahkan jenis paket wisata yang ditawarkan kepada wisatawan.

Kajian teori

Teori dependensi dikritik karena tidak dapat menjelaskan stagnasi dan keterbelakangan ekonomi beberapa negara berkembang. Teori ini melihat negara maju sebagai penyebab negara berkembang terbelakang. Andre Gunder Frank mengembangkan teori ini dengan sebutan perkembangan di bawah perkembangan sekitar tahun 1960 an. Frank (1984) berpendapat bahwa keterbelakangan berasal dari sejarah dominasi kolonial negara dunia ketiga atau berkembang dan bukanlah sesuatu yang terjadi secara alami. Negara maju pada dasarnya sengaja membatasi posisinya dengan negara dunia ketiga, hal ini dilakukan agar relasi ketergantungan dapat terus terjadi. Dalam skala global, perkembangan sistem kapitalis sangat dipengaruhi oleh hubungan ekonomi yang terjadi antara negara maju dan negara berkembang yang terbelakang ini. Frank menjelaskan bahwa kapitalisme tidak terjadi secara alami dan hanya akan merugikan negara berkembang. Dalam hal ini negara berkembang akan diserap negara maju. Teori dependensi Andre Gunder Frank didasarkan pada beberapa asumsi dasar. Pertama, ketergantungan dianggap sebagai kondisi yang wajar pada negara dunia ketiga atau berkembang. Teori Frank berusaha menjelaskan bagaimana ekonomi suatu negara telah berkembang selama bertahun-tahun di bawah kapitalisme negara maju. Faktor utama yang menghambat pembangunan bukanlah masalah kekurangan modal, tenaga, atau semangat wiraswasta.

Kedua, sejarah panjang masa kolonialisme membentuk pembagian modal dan kerja yang tidak adil. Praktik semacam ini terus diadopsi agar keuntungan terus didapatkan negara maju. Negara-negara berkembang seringkali mewarisi struktur ekonomi yang dibentuk oleh penjajahan, yang ditandai dengan spesialisasi dalam ekspor bahan mentah dan rendahnya diversifikasi ekonomi. Spesialisasi ini membatasi kemampuan mereka untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ketiga, Arus modal dan investasi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang sering kali dirancang untuk melayani kepentingan negara-negara yang berinvestasi dibandingkan untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan di negara-negara penerima. Hal ini dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam dan utang berlebihan di negara-negara berkembang.

Status Indonesia saat ini dapat dikatakan sebagai negara berkembang, terlihat dari ketergantungan Indonesia terhadap negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang kuat. Hampir semua sektor, tak terkecuali adalah pariwisata. Dalam menganalisis perkembangan pariwisata super 'premium' di TNK tumbuh dan berkembang bukan hanya disebabkan oleh faktor eksternal, melainkan juga kondisi internal. Maka dari itu, penulis memilih menggunakan perspektif teori ketergantungan (dependensi) untuk menguraikan keterkaitan sistem pariwisata TNK dengan daerah lain di Indonesia maupun dengan negara-negara maju di dunia. Selain itu, teori dependensi dipilih penulis untuk menganalisis kendali atas standarisasi dan fasilitas pada pariwisata TNK, yang pada akhirnya dapat diketahui jenis wisata yang terbentuk. Dengan kata lain analisis yang dihasilkan dapat menjelaskan bagaimana perubahan pekerjaan nelayan menjadi pelaku wisata, serta posisi tawar dan keterjangkauan masyarakat sebagai pelaku wisata lokal sebagai bagian dari sistem pariwisata TNK.

Gambaran Umum

Taman Nasional Komodo (TNK) secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Labuan Bajo, merupakan pintu masuk utama wisatawan yang berkunjung ke TNK. TNK atau lebih sering dikenal dengan Labuan Bajo menawarkan aktivitas wisata seperti atraksi Komodo, keindahan pantai, menyelam, snorkeling, ataupun menikmati perjalanan dengan kapal phinisi. Berbagai promosi digencarkan pemerintah seperti Sail Komodo 2013, Tour de Flores, serta pembangunan bandar udara Komodo. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di TNK.

Kunjungan Wisatawan Taman Nasional Komodo 2011-2021

Tahun	Wisatawan Asing	Wisatawan Domestik	Jumlah
2011	41.833	6.177	48.010
2012	41.972	801	49.982
2013	54.147	9.654	63.801
2014	67.089	13.537	80.626
2015	76.195	19.215	95.410
2016	78.617	29.094	107.711
2017	76.612	48.457	125.069
2018	121.411	55.423	176.834
2019	144.068	77.635	221.703
2020	13.089	38.529	51.618
2021	4.236	60.381	64.617

(Sumber: Balai Taman Nasional Komodo, 2024)

Berdasarkan tabel diatas, terbukti bahwa pasca Sail Komodo tahun 2013 terjadi peningkatan kunjungan wisatawan asing dan domestik. Terkecuali pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan karena pandemi Covid-19.

Industri pariwisata yang berkembang di sekitar Labuan Bajo dan TNK dapat teridentifikasi menjadi tiga aktor besar. Pertama, investor asing. Properti investor asing biasanya terdiri dari hotel dan resort mewah yang lokasinya berada Waecicu, dan pulau privat. Selain itu restoran yang berada disepanjang jalan Soekarno-Hatta Labuan Bajo kepemilikannya dari asing. Kedua, investor lokal. Akomodasi yang dimiliki meliputi perhotelan dan resort yang standarnya dibawah asing. Biasanya jenis layanan yang ditawarkan memiliki kamar dengan jumlah banyak dan tidak privat. Investor lokal juga bergerak di jasa tur pariwisata dengan menggunakan kapal pinisi atau speed boat. Ketiga, pelaku wisata lokal. Meliputi pemilik akomodasi penginapan dengan jenis layanan murah, biasanya berbentuk homestay yang berlokasi dipinggiran Labuan Bajo. Pelaku wisata lokal biasanya menyediakan jasa tur wisata yang cenderung murah karena menggunakan jenis kapal open deck. Masyarakat lokal Labuan Bajo dan TNK kebanyakan bukan merupakan pemilik usaha. Melainkan sebagai tenaga kerja yang direkrut oleh pemilik hotel, kapal, jasa tur wisata, ataupun restoran.

Ketergantungan Pariwisata Taman Nasional Komodo

Pola ketergantungan yang terjadi pada pariwisata mengakar pada internasional dan nasional sehingga berimplikasi pada masyarakat lokal. Pariwisata super premium yang digagas oleh negara seringkali menjadi dilematis, mengingat keterbatasan modal yang dimiliki investor lokal dalam menyediakan akomodasi seperti hotel, transportasi dan makanan. Disepanjang bibir pantai Gorontalo hingga Kampung Ujung Labuan Bajo, mudah dijumpai hotel-hotel mewah yang dimiliki oleh investor asing seperti halnya La Cecile dan Sylvia Hotel yang sangat mencolok keberadaannya. Dibeberapa pulau didepan Labuan Bajo seperti Kanawa, bidadari ataupun Sebayur dimiliki oleh investor asing. Pada umumnya para investor akan menikahi orang lokal dari Labuan Bajo, agar mendapatkan akses untuk melakukan investasi.

Menurut Frank (1984) ketergantungan pada investasi negara maju terjadi karena terbatasnya modal yang dimiliki oleh negara berkembang. Dalam konteks Pariwisata Labuan Bajo, ketergantungan terjadi akibat modal yang dimiliki investor dan pemerintah daerah sangat minim, bahkan jika dilihat secara mendalam, suntikan dana pembangunan banyak diberikan oleh pemerintah pusat (seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Pariwisata).

Akses permodalan menjadi sangat krusial bagi perkembangan pariwisata Labuan Bajo, hal ini terbukti dari restoran yang didominasi investor asing. Selain itu wisatawan yang menginginkan fasilitas mewah memaksa penyedia jasa untuk mengikuti pola permintaannya. Dominasi investor asing terlihat dari sedikitnya jumlah restoran dengan menu kuliner nusantara, bahkan sebagian besar menu makanan yang ada di restoran Labuan Bajo adalah menu internasional. Yang didominasi dari Italia, seperti restoran La Cecile, Baccala Bajo,

Lacucina, Atlantis Beach Club by Plataran, Mediterraneo, Madeinitaly-Ristorante Italiano, dan sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa adanya keselarasan permintaan wisatawan dan segmentasi pasar dari investor asing.

Skema pembangunan juga dilakukan oleh investor dalam negeri, khususnya dilingkup taman nasional. Di Loh Liang, PT SKL dan SL mendapat konsesi pengelolaan di zona pemanfaatan pariwisata. Namun demikian hingga kini, belum ada tindak lanjut berupa pembangunan resort, restoran ataupun properti lainnya. Justru dari perusahaan lain (BUMD) PT Flobamor sudah melakukan pengelolaan khususnya di Pulau Padar dan Komodo. PT Flobamor bertanggung jawab atas retribusi masuk wisatawan.

Aspek permodalan tidak hanya dilihat sebagai aspek yang berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan atau bahkan menuntut dengan aspek atau sektor lain. Keberadaan para investor dalam konteks ini berupaya menuntut sektor lain seperti bandara internasional (fasilitas dan jumlah penerbangan). Ketergantungan pada bidang transportasi khususnya penerbangan, dilihat dari rute maupun transit. Sebelum masuk ke Labuan Bajo sebagian besar wisatawan asing transit di Changi Airport Singapura, baru kemudian masuk ke Indonesia. Wisatawan asing dalam melakukan penerbangan cenderung memilih perusahaan tertentu sesuai dengan alasan ekonomi ataupun politik, hal ini secara tidak langsung akses pariwisata sangat bergantung pada maskapai penerbangan.

Wisatawan TNK yang didominasi oleh asing, biasanya sudah merencanakan rencana perjalanan yang meliputi tiket pesawat, hotel, dan tur wisata dalam satu paket. Hal ini dimaksudkan untuk memperlancar perjalanan dan menghindari para calo yang seringkali menawarkan harga jauh diatas rata-rata layanan wisata. Jarang bagi wisatawan asing, yang memakai agen lokal, sebagian besar wisatawan mengakses paket wisata yang telah tersedia di negaranya atau dari agen jasa tur yang berada di Bali. Menurut Miswanto dan Safaat (2018) pemasaran atau promosi wisata memegang kendali utama perjalanan wisatawan. Praktik pemasaran paket wisata secara tidak langsung mengarahkan atau 'mengontrol' wisatawan pada jadwal dan rute tertentu. Sehingga membatasi akses wisatawan asing pada jasa atau layanan pariwisata yang dimiliki oleh masyarakat lokal Labuan Bajo dan TNK.

Fokus perkembangan pariwisata Labuan Bajo masih terpusat dari Bali, hal ini bukan hanya rute penerbangan, akan tetapi sektor pariwisata Bali masih mendominasi pasar internasional di Indonesia. Sebagian besar akomodasi turis asing menuju Labuan Bajo diakses melalui agen tur wisata di Bali. Sehingga pariwisata Labuan bajo sangat bergantung pada branding dan promosi pariwisata Bali. Bukan hanya itu, investor dari negara maju menyediakan paket perjalanan wisata, paket tersebut mangakomodir seluruh kebutuhan wisatawan dari mulai tiket penerbangan, penjemputan, hotel dan sebagainya. Sehingga dapat dikatakan investor asing memegang kendali atas rute dan jadwal para wisatawan. Kuatnya jaringan dan branding investor asing membuat mereka dapat mengontrol pelaku wisata lokal yang menyediakan fasilitas bagi wisatawan. Pada saat yang sama, proses ini mempersempit akses pelaku wisata lokal yang memiliki keterbatasan modal dan jaringan untuk mandiri. Bahkan pada akhirnya pelaku wisata lokal menjadi bergantung pada investor yang memiliki kontrol tersebut.

Namun beberapa wisatawan asing juga melakukan perjalanan wisata secara mandiri, biasanya mereka merupakan backpacker internasional (minim budget). Hanya saja jumlahnya sangat sedikit. Backpacker internasional akan berkeliling mencari akomodasi penginapan, tur wisata dan makanan yang harganya relatif murah. Hal ini memberikan kesempatan bagi pelaku wisata lokal untuk mendapat keuntungan. Sama halnya dengan backpacker internasional, wisatawan lokal biasanya juga melakukan pola yang sama. Biasanya akomodasi yang dipilih memiliki tarif yang relatif murah, yang tentu saja menjadi segmen bagi para pelaku wisata lokal.

Labuan Bajo yang di proyeksikan sebagai wisata super 'premium' sangat terkontrol dengan investor-investor asing maupun lokal. Wisata super 'premium' yang dibentuk melalui paket perjalanan wisata, hotel, restoran dan fasilitas lain seolah mengidentitaskan satu kawasan wisata pada standar tertentu. Dukungan regulasi dari pemerintah semakin mempertegas jenis wisata yang ditentukan para investor, dampaknya wisatawan yang berkunjung menjadi terkontrol pada standar ataupun alur yang sudah ditentukan. Tingginya standar dari jenis layanan layanan hotel dan restoran, sangat berpengaruh terhadap sumber daya manusia pendukungnya. Dari mulai tahap perencanaan, sampai pekerja di hotel, club atau restoran kebanyakan berasal dari luar negeri. Pemanfaatan tenaga asing merupakan bentuk ketergantungan yang diakibatkan oleh

sumber daya manusia lokal tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam pasar pariwisata di Labuan Bajo.

Keberadaan investor juga beririsan langsung dengan masyarakat yang tinggal di kawasan taman nasional seperti halnya masyarakat Desa Pasir Panjang, Komodo dan Papagarang. Menurut Hills (1994) bahwa investasi asing berupaya menyebarkan pengaruhnya ke negara berkembang khususnya daerah periphery atau pinggiran. Wilayah periphery dianggap memiliki jumlah penduduk yang banyak dan murah. Dalam konteks ini, bukan hanya perusahaan multinasional yang menyebarkan industri nya, melainkan juga perusahaan lokal. Keduanya sering menanamkan modal atau investasi ke masyarakat lokal, dengan membentuk agen tur perjalanan wisata atau menjadikan masyarakat sebagai guide, ABK dan kapten kapal. Mereka mendatangi masyarakat dengan memberikan tawaran modal atau pekerjaan. Pemilik perusahaan mempekerjakan masyarakat lokal karena imbalan ataupun gaji yang rendah. Beberapa perusahaan seperti Kemanalagi.com atau Indahnesia secara langsung mendatangi masyarakat (hidup bersama masyarakat), dengan tujuan menjalin relasi dan membangun pasar. Pemilik perusahaan berpandangan bahwa masyarakat lokal yang belum menjadi pelaku wisata memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan (diberikan imbalan tertentu). Sedangkan pandangan terhadap masyarakat pelaku wisata mereka tidak loyal dan banyak menuntut upah.

Dari ketiga aktor yaitu perusahaan multinasional, investor lokal, dan Negara memiliki kepentingan yang saling berkaitan. Menurut Hills (1994) relasi antar kekuasaan negara luar dan lokal mengarah pada terciptanya struktur dan jaringan yang saling berkorelasi satu sama lain. Dalam hal ini investor asing atau perusahaan multinasional merupakan memiliki kendali kekuasaan dari luar yang mengatur kedalam, sedangkan investor lokal dan Negara hadir sebagai pendukung atas sistem yang berjalan. Kontestasi para aktor yang berkuasa terjadi mengingat tingginya potensi keuntungan yang didapatkan dari sektor pariwisata TNK, hal ini bisa disebut sebagai dinamika politik. Perusahaan multinasional, borjuis lokal, dan negara memiliki peran sentral dalam pembangunan dan ketergantungan di masyarakat. Perusahaan multinasional memiliki peran sebagai investor yang mengontrol sistem yang ada dalam, didukung dengan adanya para pemodal dari daerah atau lokal.

Negara dalam hal ini merupakan pemegang kebijakan yang mendukung adanya sistem pariwisata. Dilingkup taman nasional terdapat zonasi yang memberikan batas setiap aktivitas manusia. Zonasi tersebut yaitu zona inti, zona rimba, zona perlindungan bahari, zona pemanfaatan wisata daratan, zona pemanfaatan wisata bahari, zona pemanfaatan tradisional daratan, zona pemanfaatan tradisional bahari, zona khusus pemukiman dan zona khusus pelagis. Kebijakan zonasi dapat memberikan ruang khusus yang dapat dimanfaatkan. Disatu sisi zonasi berdampak pada masyarakat nelayan yang tinggal di taman nasional. Area jelajah yang sebelumnya bebas menjadi terbatas pada zona tertentu, secara tidak langsung berimplikasi pada berkurangnya pendapatan masyarakat.

Negara pada dasarnya telah memberikan rekomendasi kepada masyarakat yang tinggal di kawasan taman nasional untuk beralih ke sektor pariwisata. Negara memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam ekonomi pariwisata. Jenis pekerjaan yang difasilitasi oleh KLHK melalui Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) yaitu Naturalis guide atau guide khusus yang ditempatkan di dua tempat wisata yaitu Loh Liang (di Pulau Komodo) dan Loh Buaya (di Pulau Rinca). Naturalis guide dipilih melalui seleksi dari pihak BTNK, dimana terdapat indikator-indikator tertentu untuk menjadi seorang naturalis guide. Jumlah dari naturalis guide dibatasi oleh pihak BTNK, yaitu sekitar 30 orang untuk setiap lokasi wisata. Sistem kerja dari naturalis guide tersebut adalah 10 hari kerja, setelah itu libur sesuai dengan kelompoknya. Setelah itu, pihak BTNK juga menyediakan tempat untuk berjualan souvenir di tempat wisata (Loh Liang), jumlah lapaknya terdiri dari 20 an lapak. Kepemilikan lapak dimiliki oleh sebagian besar masyarakat yang memiliki modal besar. Dari kedua jenis pekerjaan yang difasilitasi BTNK, tidak mampu mengakomodir semua masyarakat, sehingga beberapa masyarakat menjadi pemahat patung komodo (dijual sebagai souvenir) yang kemudian didistribusikan pada para pemilik lapak. Peranan negara dalam mendukung pariwisata juga dilakukan melalui Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) dibawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pelatihan dilakukan secara berkala, setidaknya dalam satu tahun minimal satu kali.

Pemberian ruang bagi masyarakat oleh negara nampaknya sangat terbatas jumlahnya. Sehingga tidak dapat mengakomodir seluruh seluruh lapisan masyarakat. Keberadaan masyarakat di kawasan TNK belum banyak diketahui masyarakat luas, justru yang lebih dikenal adalah satwa Komodo. Branding satwa Komodo dan pesona alam nampaknya lebih diprioritaskan oleh pemerintah atau investor, ketimbang pariwisata berbasis masyarakat di wilayah TNK. Pekerjaan utama masyarakat sebagai nelayan menjadi terbatas di zona-zona tertentu saja dan semakin gencarnya investor masuk ke masyarakat, perlahan pekerjaan nelayan yang tidak menentu hasilnya menjadikan masyarakat beralih pekerjaan ke sektor pariwisata. Mata pencaharian baru seperti naturalist guide, freelance guide, master diving, penjual souvenir, pemahat patung dan penjual makanan. Penghasilan yang didapatkan dari sektor pariwisata dianggap masyarakat lebih stabil dibandingkan menjadi nelayan. Perubahan mata pencaharian masyarakat bukan hanya dilihat dalam konteks perubahan pengelolaan alam (zonasi) ataupun pendapatan yang lebih stabil, melainkan juga merubah cara pandang bagi generasi (remaja) berikutnya. Sebagian besar pemuda di Desa Komodo saat ini banyak mengenyam pendidikan di perguruan tinggi dengan jurusan yang berkaitan dengan pariwisata. Mereka beralih bahwa, ketika lulus akan mendapatkan pekerjaan di sektor pariwisata dengan upah atau gaji yang tinggi. Atau bagi mereka yang memiliki modal yang cukup, akan mendirikan agen tur perjalanan wisata.

Berkaitan dengan adanya perubahan mata pencaharian masyarakat tidak lepas dari adanya ketergantungan dan ketimpangan pembangunan. Menurut Hills (1994) persoalan ketergantungan berhubungan dengan ketimpangan pembangunan. Dalam arti lain, ketergantungan bersifat dinamis yaitu bagi masyarakat lokal yang memiliki kemampuan modal tidak begitu mengalami ketergantungan, sebaliknya masyarakat yang tidak memiliki modal sangat bergantung pada sistem yang berjalan. Beralihnya mata pencaharian masyarakat pada sektor pariwisata tidak berjalan dengan mulus. Bagi masyarakat lokal yang memiliki modal (memiliki lapak berjualan atau naturalis guide) maka ketergantungan tidak begitu mereka rasakan, justru pendapatan mereka bisa dikatakan stabil bahkan di saat high season mereka mendapat untung yang berkali lipat. Namun bagi masyarakat yang memiliki modal rendah dalam sektor pariwisata, maka ketergantungan akan sangat terasa. Seperti halnya freelance guide, master diving, mereka akan sangat tergantung dari perusahaan tur wisata, apakah jasa mereka dipakai atau tidak, mengingat kompetitor keduanya banyak berasal dari luar daerah. Untuk menjadi guide seseorang ditidaknya harus masuk keanggotaan Himpuwisata Indonesia (HPI), keanggotaan didapatkan melalui proses yang lama dan pelatihan dari HPI. Bagi seorang master diving, tidak hanya mempunyai kartu keanggotaan HPI, melainkan harus memiliki sertifikasi agar bisa menjadi master diving. Keanggotaan HPI dan sertifikasi master diving menjadi standarisasi bagi seseorang untuk bekerja ke perusahaan. Sehingga kontrol perusahaan atas guide dan master diving sangat kuat. Bagi penjual souvenir keliling, pemahat patung dan penjual makanan mereka adalah pelaku wisata yang memiliki posisi tawar paling rendah, pekerjaan tersebut mereka lakukan karena modal yang minim. Selain itu, sebagian besar pemahat patung dan souvenir keliling merupakan anak buah dari pemilik lapak di tempat wisata, sehingga ketergantungan sangat melekat pada pekerjaan tersebut.

Bagian ini menjelaskan hasil penelitian secara rinci, termasuk menampilkan hasil-hasil perhitungan, hasil analisis kebutuhan, dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini juga dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar, dengan ketentuan bahwa tabel atau gambar tidak boleh terlalu panjang, terlalu besar, dan terlalu banyak. Penulis sebaiknya menggunakan variasi dalam penyajian tabel atau gambar, serta setiap tabel atau gambar yang disajikan harus dirujuk (tidak ditulis ulang) dalam teks. Sebaiknya tidak memasukkan tabel hasil olah data SPSS ke dalam artikel (penulis diharuskan merangkum ulang dan membuat tabel tersendiri sesuai dengan format yang diminta dalam template ini).

PENUTUP

Proyeksi besar menjadikan TNK sebagai destinasi super premium memiliki konsekuensi logis dengan investasi negara asing dalam mendukung pembangunan. Investor tersebut pada akhirnya memegang kendali penuh untuk menentukan jenis produk wisata yang akan diciptakan. Rute pesawat (transit), sumberdaya manusia, dan promosi dari negara maju merupakan ketergantungan lainnya yang pada akhirnya sulit bagi

pelaku wisata memiliki posisi tawar yang tinggi. Sehingga pelaku wisata lokal hanya mendapatkan bagian kecil dari gemerlapnya pariwisata TNK. Ketergantungan yang terjadi tidak hanya dilihat secara makro, namun disini masyarakat yang bekerja pada sektor pariwisata turut mengalami ketergantungan. Akses modal, jaringan, dan branding yang lemah menempatkan mereka pada level terendah dalam pengelolaan pariwisata, sehingga posisi tawar masyarakat menjadi sangat lemah dalam arena kontestasi pariwisata di TNK

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Arif. (1995). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Frank, Andre Gunder. (1984). *Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi Pustaka*. Jakarta: Pulsar.
- Gunawan, M. P. (1994). Pengembangan Pariwisata Internasional di Indonesia Dalam Konteks Teori Ketergantungan. *Journal of Regional and City Planning*, 5(16a), 4-13.
- Hills, J. (1994). Dependency theory and its relevance today: international institutions in telecommunications and structural power. *Review of International Studies*, 20(2), 169-186.
- <https://www.kompasiana.com/yudhaheka/5510820f8133115a3bbc6496/taman-nasional-komodo-resmi-menjadi-the-new-seven-wonders-of-nature>
- Ikhsan, M. (2017). Multiplier Effect Industri Pariwisata Candi Muara Takus Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Xii Koto Kampar Kabupaten Kampar. *JOM Fekon*, 4(1), 689-700.
- Karim, A. (2017). Pariwisata dan Kekuasaan: Sebuah Telaah Foucauldian. *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya*, 1(1), 81-105.
- Lee, D., Hampton, M., & Jeyacheya, J. (2015). The political economy of precarious work in the tourism industry in small island developing states. *Review of International Political Economy*, 22(1), 194-223.
- Miswanto, M., & Safaat, M. (2018). Dampak Pembangunan Industri Pariwisata terhadap Alih Fungsi Lahan. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 20(1), 45-55.
- Moleong, L. (2010). Metode penelitian. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019
- Rajapakse, C. R. (2016). The relationship between foreign direct investment and tourism development: evidence from Sri Lanka. *International Journal of Research in Economics and Social Sciences*, 6(5), 183-193.
- Spradley, J. (1980). Participant Observation" Holt, Rineart and WinSton, Inc. New York.
- Streimikiene, D., Svagzdiene, B., Jasinskis, E., & Simanavicius, A. (2021). Sustainable tourism development and competitiveness: The systematic literature review. *Sustainable development*, 29(1), 259-271.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan UU 8/2003, Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Yakub, Anggita Permata. (2019). Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Tesis*. Universitas Airlangga Surabaya